



Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemberitaan Media

Abdul Rozak

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: abdul.rozak@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the Kompas describes and interprets an issue on bribery of beef imports involving an official figure of the Prosperous Justice Party (PKS), Lutfi Hasan Ishaq. This study used blended methods of quantitative content analysis and framing model of Pan and Kosicki. Quantitative content analysis focused on the use of the printed sources, newspapers points of view, news in general repostage of the PKS and PKS president; while the framing was conducted by investigating the structure of the syntax, script, thematic, and rhetoric of the news. The results obtained by analysis of three conclusions. Firstly, Kompas Newspaper has successfully distinguished itself with a tendency to press earlier era through the use of the printed sources are more diverse, not only rely on official sources of government, and involved parties is a major as part in the news. Secondly, Kompas Newspaper was relatively neutral, objective, and independent. Thirdly, Kompas Newspaper interpreted the bribery case meat imports as a matter of law, not politics.

Keywords : Prosperous Justice Party, media framing, model Pan and Kosicki

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Harian Kompas menggambarkan dan memaknai peristiwa suap impor daging sapi yang melibatkan petinggi Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode analisis isi kuantitatif dan framing model Pan dan Kosicki. Analisis isi kuantitatif difokuskan pada penggunaan sumber-sumber kutipan, sudut pandang sumber pemberitaan, orientasi pemberitaan secara umum terhadap presiden PKS dan PKS; sementara framing dilakukan dengan melihat struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dari pemberitaan. Berdasarkan hasil analisis diketahui pertama, Kompas telah berhasil membedakan dirinya dengan kecenderungan pers pada era sebelumnya melalui pemakaian sumber-sumber kutipan yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan sumber-sumber resmi negara, dan melibatkan pihak yang menjadi pelibat utama dalam pemberitaan. Kedua, Kompas bersifat relatif netral, obyektif, dan independen. Ketiga, Kompas memaknai kasus suap impor daging sebagai masalah hukum, bukan politik.

Kata Kunci : Partai Keadilan Sejahtera, Pemaknaan Media, Model Pan dan Kosicki

PENDAHULUAN

“Masihkah PKS Bermasa Depan?” Demikian judul buku bernada pertanyaan tentang nasib Partai Keadilan Sejahtera paska ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus impor daging oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peristiwa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahannya Presiden PKS bagaikan menikam jantung partai politik yang mulai menanjak pamornya sejak Pemilu 2004. Partai dakwah yang selama ini terkenal bersih dan santun tersebut (Setiana, 2009) citranya langsung terjun bebas di mata masyarakat, sebagaimana nampak pada hasil-hasil survei elektabilitas partai politik. Penetapan Luthfi sebagai tersangka kasus suap impor daging merupakan bencana bagi PKS. Selama ini, PKS membangun citra diri sebagai partai dakwah dengan mengusung jargon bersih, peduli, dan profesional. Bahkan, dalam situsnya sempat ditampilkan foto Luthfi dengan keterangan “bersih dari korupsi bukan prestasi, tetapi kewajiban” (Khoiri, 2013).

Peristiwa ditetapkannya Presiden PKS sebagai tersangka kasus suap impor daging tersebut tentu saja menjadi isu panas yang dengan sigap ditangkap oleh media. Hampir semua media massa di Indonesia mengangkat kasus tersebut pada *prime time* ataupun *headline news* mereka. Media massa cetak menurunkan berita kasus dugaan suap impor daging sapi ini dengan huruf-huruf besar dan mencolok pada *head line* media masing-masing akhir Januari 2013 sampai dengan pekan pertama Februari 2013. Hampir semua media cetak, nasional maupun daerah, menjadikan peristiwa kasus suap impor daging sapi sebagai topik utama pemberitaan (*headline news*).

Surat kabar sebagai bagian dari media massa memang merupakan sarana yang efisien dan efektif untuk menyebarkan isu dan membentuk opini publik. Melalui agenda yang disusun, media dapat mengarahkan khalayak kepada satu perspektif sehingga mereka memiliki penafsiran yang sama dengan media. Tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan aktor dibalik media, ideologi, nilai-nilai, serta visi dan misi media itu sendiri. Karena itu, Amir Effendi Siregar (Kompas, 20/07/2013), menjawab pertanyaan yang ia lontarkan sendiri “Mungkinkah media itu independen dan netral 100 persen? Tidak akan pernah! Namun, semakin tinggi derajat independensi dan netralitasnya, semakin tinggi derajat kredibilitasnya, semakin disukai dan semakin mampu membentuk opini publik.”

Disadari atau tidak, meminjam istilah Santoso Hamidjoyo, media

sering kali terjebak melakukan komunikasi manipulatif karena isi pesan tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Rekayasa pesan yang menyebabkan komunikasi manipulatif dapat terjadi karena penuh kepentingan: mengarahkan pesan, penyajian pesan berat sebelah, sampai penyodoran kebohongan. Kebohongan menjadi komoditas sebab pers tak tampil profesional. Untuk memperkuat pendapat tersebut, Sinansari Ecip mengutip kesimpulan hasil riset Pusat Kajian Media dan Jurnalistik pada bulan Februari, Maret, dan April 2010 (Ecip: 2010). Kesimpulan tersebut antara lain: *Pertama*, kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa stasiun TV digunakan pemiliknya untuk kepentingan golongan tertentu telah terjadi. *Kedua*, satu parpol besar paling banyak diberitakan (kasus korupsi) dan parpol baru (pencitraan; hanya di satu stasiun TV, sama sekali tidak dilakukan oleh satu stasiun TV yang lain). *Ketiga*, frekuensi radio yang dipakai stasiun TV adalah milik publik semestinya digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk golongan tertentu. *Keempat*, iklan satu parpol ditayangkan di satu stasiun TV 1.112 kali (apakah pajaknya sudah dibayar). *Kelima*, sebagian besar berita parpol di kedua stasiun TV tak berimbang; mayoritas faktanya hanya satu sisi.

Pemberitaan tentang kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden dan elit-elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan contoh bagaimana media massa menerapkan kepentingan ataupun ideologi karena setiap berita merupakan sebuah konstruksi realitas yang dikemas sesuai kebijakan masing-masing surat kabar. Pembingkaihan surat kabar dalam melihat kasus suap impor daging yang melibatkan Presiden dan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentu berbeda-beda tergantung dari ideologi, kepentingan, dan kebijakan redaksional masing-masing media. Selain itu sudut pandang wartawan dalam melihat kasus ini tentu tidak sama antara satu dengan yang lain, demikian juga dengan Harian Kompas.

Masih belum banyak studi yang menggunakan analisis kualitatif terlebih dengan pendekatan kritis seperti analisis wacana ataupun framing dalam melihat isi media. Studi yang relevan antara lain dilakukan Cahyana (2003), Yursak dkk (2007), Muizzu (2011), Kurniati (2009), dan Sari (2013).

Melalui risetnya terhadap sejumlah pemberitaan dan editorial media cetak tentang kasus Eddie Widiono yang diduga terlibat dalam mark up pengadaan mesin pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Borang, Palembang, Sumatera Selatan, Yursak dkk, (2007) menunjukkan adanya kecenderungan media menjadi arena pertempuran berbagai kelompok dengan beragam kepentingan, latar belakang, dan sudut pandang tertentu.

Kecenderungan tersebut nampak nyata pada Kompas, Rakyat Merdeka, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Gatra, dan Forum keadilan. Dengan analisis isi kuantitatif dan analisis teks media sebagai pisau analisis, Yursak dkk. menemukan hal yang menarik: *Pertama*, mayoritas berita menunjukkan bahwa media tidak mampu mempertahankan netralitasnya dalam menilai sosok Eddie Widiono. Ada proses delegitimasi melalui penggambaran citra negatif terhadap sosok Eddie Widiono yang dilakukan oleh Kompas, Rakyat Merdeka, dan Suara Pembaruan. Hal tersebut dilakukan melalui perspektif, penggunaan bahasa, dan pola pemberitaan seputar kasus dugaan mark up pengadaan mesin yang tampak lebih menonjolkan praduga, prasangka, dan penghakiman daripada mengungkapkan fakta yang sebenarnya. *Kedua*, media-media cenderung memperlakukan Eddie Widiono sebagai tertuduh dengan cara tidak memberikan ruang yang proporsional baginya dan sumber-sumber internal PLN untuk berpartisipasi aktif sebagai sumber pemberitaan.

Hal agak berbeda diperlihatkan oleh majalah berita Tempo, Gatra, dan Forum Keadilan. Tempo memiliki intensitas yang paling tinggi dalam memberitakan sosok Eddie Widiono dengan senantiasa melibatkan aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan sebagai sumber pemberitaan primer. Di samping itu, Tempo seringkali menggunakan sumber berita tanpa nama dengan menyebut 'menurut sumber Tempo' dalam menulis berita tentang kasus tersebut. Forum Keadilan terlihat lebih netral dalam memberitakan kasus Eddie Widiono dengan tidak mengutip pernyataan penegak hukum, bahkan menggambarkan Eddie sebagai seorang pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Sedangkan Gatra menurunkan berita yang sifatnya hanya berupa 'laporan peristiwa' dan menempatkan Eddie sebagai tokoh yang meskipun menjadi tersangka namun tetap diperlukan keberadaannya.

Riset kedua adalah yang dilakukan Muizzu (2011). Dengan pendekatan Theo van Leeuwen, Muizzu menunjukkan bahwa harian Kompas cenderung mendukung Bibit dan Chandra daripada Kepolisian dan Kejaksaan. Hal tersebut ditunjukkan dari 11 tajuk rencana yang diteliti, 8 diantaranya menunjukkan keberpihakan Kompas pada Bibit dan Chandra. Menurut Muizzu, sikap tersebut terkait dengan konteks, historisitas, dan ideologi harian Kompas. Dari sisi konteks, menurut Muizzu, sikap Kompas mengapresiasi dukungan massa pada Bibit-Chandra tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakternya sebagai media yang senantiasa berupaya meredam konflik demi stabilitas nasional dan

kebangsaan. Sementara dari perspektif ideologi, sikap Kompas dimaknai sebagai penguatan atas ideologi fungsionalisme struktural.

Studi lainnya dilakukan oleh Nia Kurniati (2009), menyoroti framing Kompas dan Republika atas konflik Palestina-Israel. Dengan meminjam dimensi sintaksis model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, Kurniati sampai pada kesimpulan adanya perbedaan pembingkai yang dilakukan oleh kedua harian nasional tersebut. Jika Kompas cenderung membingkai secara positif Israel dengan memberitakan adanya niat baik Israel yang menawarkan perdamaian namun ditolak oleh Hamas, maka Republika sebaliknya dengan memaknai konflik tersebut sebagai masalah Israel yang ingin menghabisi Palestina dengan berbagai cara dan alasan.

Penelitian lain yang terkait dengan wacana media terhadap suatu kelompok minoritas adalah studi Cahyana yang melakukan analisis isi terhadap pemberitaan Tempo, Suara Karya, Jawa Pos, dan Sabili terhadap aktivitas dan tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Cahyana, 2003). Riset ini berupaya menguak bagaimana perspektif media terhadap sekelompok orang yang dianggap sebagai Islam Jamaah. Dengan menggunakan analisis wacana model kognisi sosial Teun van Dijk dan observasi partisipan terhadap obyek, Cahyana menemukan bahwa keempat media yang diteliti tidak proporsional dalam memberitakan LDII, selalu memberi label buruk dan mensugestikan bahwa organisasi dan ajaran yang dibawa LDII berbahaya dan sesat.

Studi berikutnya adalah penelitian Sari (2013) yang melalui pendekatan model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki menyimpulkan bahwa Republika cenderung berhati-hati dalam menilai keterlibatan Luthfi. Ini nampak dari sikap Republika yang menganggap KPK telah menjalankan tugasnya dengan benar, namun pihak PKS juga harus diberi kesempatan untuk menelusuri kasus ini dari sudut pandangnya sendiri. Republika lebih menekankan bahwa PKS harus berbenah atas kasus Lutfhi Hasan Ishaq ini. Kesimpulan tersebut diperoleh dari pemilihan judul, penggunaan perangkat framing berupa grafis dan koherensi, dan leksikon dalam penulisan beritanya. Berita-berita Harian Media Indonesia di sisi lain, banyak memuat berita-berita yang menekankan bahwa Lutfhi Hasan Ishaq memang bersalah dan mendukung penuh kerja KPK. Hal tersebut terlihat dari judul-judul yang diangkat dan alasan mengapa Lutfhi Hasan Ishaq ditahan oleh KPK. Media Indonesia menganggap bahwa Lutfhi hanya bagian dari permainan PKS walaupun tidak disertai dengan analisis tentang keterlibatan PKS sebagai Partai yang membesarkan nama Lutfhi Hasan

Ishaaq kala menjabat sebagai Presiden.

Media massa memiliki peran signifikan dalam kehidupan politik sehingga sering disebut sebagai kekuatan keempat setelah eksekutif, yudikatif. Salah satu media massa yang populer di masyarakat adalah surat kabar, tempat di mana sekelompok profesional melaksanakan praktek jurnalisme dengan idealisme memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat (Siregar: 2003). Namun, kesalahan media massa terkait dengan pemberitaan politik juga sering dilontarkan pengamat.

Faktor kepemilikan dan kebijakan editorial selalu menjadi sasaran tembak untuk mengungkap sisi gelap media. Belum lagi, begitu tulis Sidik Pramono, wartawan yang berulah dan orientasi politik menjadi sumber tudingan miring seputar pemberitaan. Karena itu, telah terjadi persinggungan kental antara profesi wartawan dengan hubungan masyarakat dan kelompok kepentingan. Sejumlah besar isu yang dimuat media tidak lagi murni muncul dari riset para jurnalis, tetapi muncul dari “bombardir informasi” dari para pekerja humas dan kelompok kepentingan (Pramono, Kompas 2/10/2013).

Pandangan kaum positivis bahwa berita itu obyektif mendapat sanggahan dari pengikut aliran konstruksionis yang meyakini bahwa berita bersifat subyektif karena merupakan konstruksi atas realitas. Opini wartawan dalam menulis sebuah berita tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif. Dengan kata lain terdapat bingkai yang digunakan oleh wartawan dan media dalam meliput suatu peristiwa dan menyajikannya ke dalam berita. Media bukanlah medium yang netral melainkan alat kelompok dominan untuk melanggengkan pandangan dan kekuasaannya. Untuk itu diperkuatlah kesan kewajaran dan rasionalitas suatu pemberitaan melalui strategi tertentu yang diakses pada awal pemrosesan cerita. Perlengkapan itu disebut perangkat framing yang meliputi: *headline*, *lead*, *pull quote* (kutipan yang diambil dari artikel dan dicetak dengan huruf besar), dan *nut graph* (paragraf kunci dalam artikel yang menceritakan isi artikel itu).

Secara umum, *framing* mempunyai dua aspek penting yaitu memilih fakta dan menulis fakta. Wartawan harus memilih realitas yang hendak ditulisnya karena wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Disini terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angel* dan melupakan faktor yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek yang lain. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas

suatu peristiwa bisa kontradiksi antara media yang satu dan media yang lainnya. Sedangkan menulis fakta merupakan proses bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: menempatkan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap sosial budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya.

Pembingkaiian informasi merupakan proses konstruksi atas realitas yang tidak terbentuk secara ilmiah melainkan dibentuk dan dikonstruksi berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial yang dimiliki individu. Berita dalam pandangan Berger bukan merupakan fakta dalam arti yang riil, melainkan produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Begitu pun ketika wartawan melakukan wawancara. Realitas yang terbentuk dari realitas tersebut adalah produk interaksi antara keduanya. Realitas hasil wawancara bukan hasil operan antara apa yang dikatakan oleh narasumber dan ditulis sedemikian rupa ke dalam berita, melainkan telah diedit dan direkonstruksi oleh wartawan. Karena itulah proses pemberitaan dalam organisasi media akan sangat mempengaruhi *frame* berita yang akan diproduksi dan tidak dapat dilepaskan dari latar-belakang wartawan dan ideologi institusi media.

Menurut Aditjondro (dalam Sobur: 2000), terdapat tiga proses pembingkaiian berita dalam organisasi media, sebagai berikut: (1) Proses pembingkaiian berita sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalikkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu, memilih narasumber, dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya. (2) Proses pembingkaiian berita merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak. Redaktur, dengan atau tanpa konsultasi dengan redaktur pelaksana, menentukan apakah laporan si reporter akan dimuat ataukah tidak, serta menentukan judul yang akan diberikan. (3) Proses pembingkaiian berita tidak hanya melibatkan para pekerja pers seperti wartawan, reporter, ataupun redaksi semata, tetapi juga pihak-pihak

yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkannya (sambil menyembunyikan sisi yang lain). Proses pembingkai berita menjadikan media massa sebagai arena dimana informasi tentang masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca.

Terdapat beberapa penjelasan mengapa media sering memarjinalkan dan mengabaikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Teori instrumentalis menekan pada kepentingan pemilik dan rejim yang berkuasa. Media, bagi mereka adalah alat dari pemilik sehingga isi media juga mencerminkan kepentingan dan pandangan pemilik. Misalnya, kenapa media cenderung memberikan ruang atau waktu yang lebih kepada organisasi atau lembaga tertentu untuk tampil dan dikover dibanding organisasi lainnya. Itu karena pemilik media adalah bagian atau simpatisan dari organisasi yang bersangkutan. Atau karena kegiatan organisasi tertentu mendukung kebijakan penguasa. Di sisi lain, pengikut teori strukturalis berpandangan bahwa kecenderungan pemberitaan media tidaklah ditentukan pemilik media melainkan oleh struktur dan dinamika media itu sendiri seperti pelanggan, oplah, ataupun iklan. Media hampir selalu memberitakan buruh secara buruk dan menggambarkan pengusaha lebih positif karena memiliki kepentingan dengan iklan yang dimiliki oleh pengusaha.

Bagaimana Harian Kompas memaknai dan membingkai peristiwa suap impor daging sapi yang melibatkan petinggi partai dakwah tersebut? Merupakan sesuatu yang menarik untuk mengetahui bagaimana *frame* atau pembingkai yang dikembangkan Harian Kompas dalam menyajikan realitas yang melibatkan Presiden dan elit PKS berkaitan dengan kasus suap impor daging sapi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif yang memfokuskan perhatian pada orientasi . Peneliti tidak mengambil semua data yang terkait objek penelitian dan hanya mengambil data-data yang sangat relevan saja. Teknik ini dikenal sebagai *purposive sampling*. Teknik sampling ini bertujuan untuk memperoleh kedalaman studi dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, peneliti hanya memilih beberapa berita yang dianggap paling penting dari berbagai berita yang dirilis oleh Kompas tentang kasus suap impor daging yang melibatkan presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaq.

Kompas dipilih sebagai subyek penelitian dilandasi oleh beberapa hal,

antara lain: *Pertama*, Kompas cukup aktif mengikuti perkembangan kasus suap impor sapi yang ditunjukkan dengan tingginya frekuensi pemberitaan tentang kasus tersebut. *Kedua*, Kompas merupakan representasi media cetak nasional yang oplah dan distribusinya merata hampir ke seluruh wilayah di Indonesia; *Ketiga*, Kompas merupakan salah satu media yang sering dijadikan rujukan banyak pihak berkaitan dengan berita dan analisis peristiwa-peristiwa politik.

Sementara itu pemilihan edisi Januari-Februari 2013 didasarkan pada fakta bahwa pada periode tersebut peristiwa kasus suap impor sapi yang melibatkan Presiden dan elit PKS menjadi isu panas yang menyedot banyak perhatian. Objek penelitiannya adalah adalah berita-berita seputar kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden dan elit-elit Partai Keadilan Sejahtera.

Data dikumpulkan dengan cara pencermatan atas dokumen tertulis, dalam hal ini berita-berita tentang suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden dan elit-elit PKS pada Harian Kompas edisi Januari-Februari 2013. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis isi kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencoba menganalisis perilaku surat kabar Kompas dalam meliput dan memberitakan kasus dugaan suap impor daging yang melibatkan Presiden dan elit-elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tulisan ini menganalisis dinamika pemberitaan media tersebut dalam rentang waktu 31 Januari hingga 26 Februari 2013.

Dalam periode tersebut, Kompas menurunkan berita tentang kasus suap impor daging yang melibatkan Presiden dan elit-elit PKS sebanyak 26 kali. Dilihat dari letak halaman, distribusi berita tersebut adalah: 5 berita di halaman pertama, 6 berita di halaman 2, 7 berita di halaman 3, 2 berita di halaman 4, 5 berita di halaman 5, dan 1 berita di halaman 15. Melihat letak halaman dimana berita tersebut diletakkan, nampaknya Kompas melihat kasus tersebut sangat penting. Sementara dari pengkategorisasian, Kompas meletakkannya dalam bingkai hukum dan politik karena halaman 2,3,4, dan 5 merupakan berita dengan kategori politik dan hukum. Hanya satu berita yang non politik dan hukum, yaitu berita dengan judul “KORUPSI POLITIK: Tahun Politik 2013 Kian Padat dengan Agenda Pengumpulan Dana,” di halaman 15 yang berkategori umum.

Hasil analisis, sebagaimana nampak pada tabel 1, menunjukkan

bahwa Kompas tidak tergantung dengan sumber-sumber berita resmi negara seperti aparat penegak hukum, birokrat, maupun parlemen. Ini terlihat dari 104 sumber berita yang dikutip Kompas, hanya 34 buah atau 36% berasal dari sumber resmi negara, sedangkan 70 buah atau 64% dari sumber-sumber non-resmi seperti lembaga independen, akademisi, penasehat hukum, aktivis LSM, ataupun partai politik. Temuan ini membantah penelitian terdahulu yang menemukan tingginya minat dan kegandrungan media massa Indonesia dalam mengutip dan menjadikan sumber-sumber resmi kekuasaan negara sebagai referensi utama. Bahkan di masa lalu, ada ungkapan sinis yang menyatakan bahwa media massa Indonesia telah menjadi petugas hubungan masyarakat sekaligus *press release* pemerintah (Yursak dkk., 2007: 60).

Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam mengutip keterangan sumber-sumber yang lebih beragam, tidak lagi begitu bergantung pada sumber-sumber resmi pemerintah. Bahkan jika diperhatikan secara detail, Kompas memberi ruang yang lebih banyak terhadap sumber-sumber dari Partai Keadilan Sejahtera dan Luthfi Hasan Ishaq melalui tim penasehat hukum atau pengacaranya selaku pihak utama yang dikaitkan dengan dugaan suap/korupsi impor daging. Luasnya akses yang diberikan kepada berbagai pihak menunjukkan adanya keseimbangan dalam menggunakan sumber berita. Nampaknya Kompas sadar ketidakseimbangan dalam menggunakan sumber berita dapat mengurangi derajat obyektivitas berita yang dimuat, sebagaimana ditegaskan Merrill dan Dennis, bahwa obyektivitas pemberitaan hanya dapat dicapai dengan tiga cara: pemisahan antara fakta dan opini, penyajian berita tanpa disertai dimensi emosional, serta bersikap jujur dan seimbang terhadap semua pihak (Yursak dkk., 2007: 60).

Penggunaan sumber berita seimbang dan proporsional mengurangi kemungkinan merugikan salah satu pihak. Luthfi Hasan Ishaq dan elit PKS sebagai aktor utama dalam pemberitaan telah dipenuhi haknya untuk terlibat aktif dalam wacana yang dikembangkan. Keseimbangan penggunaan sumber berita ini juga menunjukkan jurnalis dan pengelola Kompas tidak berpretensi mengembangkan *trial by press* media dalam menulis berita.

Tabel 1. Sumber-Sumber Kutipan Berita Tentang Suap Impor Daging

Sumber berita	Frekuensi	%
Partai Keadilan Sejahtera	28	29.12
Komisi Pemberantasan Korupsi	19	19.76
Advokat/Pengacara	12	12.48
Imigrasi	1	1.04
Pengadilan	1	1.04
Parlemen	3	3.12
Aktivis LSM	15	15.6
Akademisi	6	6.24
Kementerian Pertanian	2	2.08
Presiden	1	1.04
PPATK	1	1.04
Menteri Pertanian	3	3.12
Kejaksaan Agung	3	3.12
Partai Politik	6	6.24
Lain-lain	3	3.12
Jumlah	104	100

Sumber: Diolah dari dokumentasi berita Kompas 31 Januari - 26 Februari 2013

Keseimbangan dalam penggunaan sumber berita ini berimplikasi menghindari dominasi perspektif tertentu dalam pemberitaan. Selain lebih banyak menggunakan sumber berita dari kalangan Partai Keadilan Sejahtera, Kompas juga banyak menonjolkan sudut pandang sumber-sumber berita non-pemerintah dalam merekonstruksi kasus suap impor daging yang melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, sebagaimana nampak pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Sudut Pandang Sumber Pemberitaan suap impor daging

Sudut Pandang	Frekuensi	%
Partai Keadilan Sejahtera	38	39.52
Aparat Hukum	22	22.88
Advokat/Pengacara	2	2.08
Birokrat	9	9.36
Anggota Parlemen	3	3.12
Aktivis LSM	15	15.6
Akademisi	6	6.24
Partai Politik	6	6.24
Tidak ada yang dominan	3	3.12
Jumlah	104	100

Sumber: Diolah dari dokumentasi berita Kompas 31/1 sd 26/2/2013

Dari tabel 2 yang menampilkan sudut pandang sumber pemberitaan tersebut dapat dilihat bahwa perspektif kalangan birokrasi, aparat penegak hukum, dan anggota parlemen yang berjumlah 34 buah (35.36%), masih kalah dominan dibanding sudut pandang Partai Keadilan Sejahtera yang mencapai 38 buah (39.52%). Ini menunjukkan bahwa Kompas tidak mendelegitimasi Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera secara kelembagaan. Contohnya adalah berita halaman pertama 31 Januari 2013, “SUAP IMPOR DAGING, Jadi Tersangka, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq Dijemput KPK”. Dalam berita ini Kompas hanya menuliskan kronologis penetapan tersangka dan penjemputan Luthfi Hasan Ishaq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa atas kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Bahkan Kompas juga mengutip pernyataan Luthfi Hasan Ishaq dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, “Seandainya dimaksudkan saya, sebagai warga negara Indonesia akan taat dan menghormati proses hukum. Tetapi sudah barang tentu indikasi tentang penyuaipan itu, andai benar, saya tidak menerimanya, tidak pula kader atau pengurus partai menerima itu. Semua kader PKS menahan diri dan terus berjuang agar negeri ini bebas dari korupsi, dan itu menjadi komitmen PKS.”

Selanjutnya, pola pemberitaan yang dikembangkan Kompas melahirkan orientasi dan penggambaran tertentu terhadap citra dan kredibilitas Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera. Dari berita-berita yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa Kompas mampu mempertahankan netralitas dan obyektivitasnya dalam menilai Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera, khususnya berkaitan dengan kasus dugaan impor daging.

Studi ini menemukan tidak adanya upaya delegitimasi dengan menggambarkan citra negatif semata terhadap Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera. Dari 10 berita yang dimuat Kompas berkaitan dengan Luthfi Hasan Ishaq, 4 berita (40%) diantaranya menggambarkan citra negatif terhadap sosok Luthfi, 4 buah berita (40%) netral, dan 2 buah (20%) berita dapat dikategorikan positif. Demikian juga dengan pemberitaan tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS): dari 17 berita terdapat 7 berita (41.18%) netral, sedangkan yang menggambarkan citra bernada negatif sebanding dengan positif, yaitu masing-masing 5 berita (29.41%).

Secara rinci orientasi pemberitaan secara umum tentang Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera oleh Kompas disajikan pada tabel 3 dan 4 berikut:

Tabel 3. Orientasi Pemberitaan Secara Umum Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq terkait kasus suap impor daging

Orientasi Pemberitaan	Frekuensi	%
Positif	2	20
Negatif	4	40
Netral	4	40
Jumlah	10	100

Sumber: Diolah dari dokumentasi berita Kompas

Tabel 4. Orientasi Pemberitaan Secara Umum tentang PKS

Orientasi Pemberitaan	Frekuensi	%
Positif	5	19.2
Negatif	5	61.6
Netral	7	19.2
Jumlah	17	100

Sumber: Diolah dari dokumentasi berita Kompas

Berdasarkan data sumber-sumber berita yang dikuti tersebut, secara umum terlihat bahwa Kompas berhasil membedakan dirinya dengan pers pada era-era sebelumnya yang cenderung menjadi kepanjangan tangan sumber-sumber resmi negara. Kompas telah menempatkan pendapat, komentar, argumentasi, dan bantahan dari pihak Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara proporsional dan seimbang. Ini berarti Kompas telah menunjukkan upaya menjadi pers yang relatif obyektif dan independen dari kekuasaan negara. Ini senada dengan apa yang diungkapkan Ariyanti (2010) bahwa pers yang baik haruslah jujur dan seimbang dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjawab dan memberikan informasi secukupnya kepada masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis isi terhadap berita-berita tentang suap impor daging yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang diturunkan Kompas edisi 31 Januari s/d 26 Februari 2013 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kompas telah berhasil membedakan dirinya dengan kecenderungan pers pada era sebelumnya melalui pemakaian sumber-

sumber kutipan yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan sumber-sumber resmi negara, dan melibatkan pihak yang menjadi pelibat utama dalam pemberitaan. (2) Kompas tidak memiliki kecenderungan mendelegitimasi Luthfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemberitaan suap impor daging. Dengan kata lain pemberitaan Kompas bersifat relatif netral, obyektif, dan independen. (3) Kompas memaknai kasus suap impor daging sebagai masalah hukum, bukan politik. Ini terlihat dari digunakannya penjelasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tim penasihat hukum Luthfi, dan elit Partai Keadilan Sejahtera sebagai acuan utama dalam pemberitaan tentang suap impor daging.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. (1999). Prospek Berita Pemilu Dalam Membentuk Memoro Kolektif Khalayak, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1) 64-79
- Ali, N. (2010). *Ideologi Media Massa*, Kompas, Kamis 15 April 2010
- Ariyanti, V. (2010) Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana, *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1) Januari-Juni 2010 1-13
- Cahyana, L. (2003). *Islam Jamaah Di Balik Pengadilan Media Massa: Suatu Analisis mengenai Pembunuhan Karakter terhadap Lemkari/LDII*, Yogyakarta: Benang Merah.
- Ecip, S. (2010). *Waspadai Komunikasi Manipulatif*. Kompas 15 April 2010
- Eriyanto (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Khoiri, I. (2013). *Partai Keadilan Sejahtera, Menunggu Macan Bangun dari Tidur*, Kompas 2 Februari.
- Kurniawan, E. (2013). *Masihkah PKS Bermasa Depan?*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Kurniati, N. (2009). *Perbandingan Sintaksis Pemberitaan tentang Konflik Palestina-Israel di Surat Kabar Kompas dan Republika Periode 2 Januari – 3 Pebruari 2009*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,
- Muizzu, A. (2011). *Sikap Media Massa terhadap Kasus Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah: Analisis Wacana Kritis Tajuk Rencana Kompas Edisi November 2009*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,
- Pramono, S. (2013). Perilaku Politik: Memelintir Kebijakan, Menyalahkan Wartawan, Kompas, 2/10/2013.
- Semetko, A. H. dan Valkenburg, P. M. (2000). *Framing Euepean Politics: A*

- Content Analysis An Television News, Journal Of Communication, Spring*, Vol 50. No 21. Akses tanggal 26 April 2011
- Setiana, W. (2009). Deviasi Orientasi Gerakan Dakwah Partai Keadilan Sejahtera. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. 4(14) (2009) 639-656.
- Siregar, A. E. (2013). Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media. Kompas, 20 Juli 2013.
- Siregar, Ashadi. (2013) *Bagaimana Menulis dan Meliput Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta
- Sobur, A. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yursak, F., Hasan, Q. dan Syahbuddin, B. (2007). *Eddie Widiono Di Bawah Pusaran Media*. Jakarta: Next Reign Media.

